

## PERKEMBANGAN KOTA KECIL MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Su Ritohardoyo

Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

e-mail: r\_hardoyo@yahoo.com

### **Abstrak**

Kesenjangan masih sering terjadi dalam studi pengembangan kota kecil, selama ini kurang memperoleh perhatian. Oleh karenanya perlu penelitian bertujuan mengkaji sejarah perkembangan kota kecil dan perekonomian wilayah; kontribusi faktor lokasi dan keterkaitan dengan perkembangannya. Penelitian dilakukan di kota kecil Muntilan Kabupaten Magelang, menggunakan metode penelitian analisa data sekunder. Unit analisis adalah desa diteliti secara sensus, dalam kerangka ini populasi penelitian diambil semuanya. Analisis data menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian ini mengungkap terjadinya perkembangan Kota Muntilan dicirikan oleh: (1) kondisi perekonomian wilayah yang tumbuh dengan laju 6,42 %/ tahun, dan pendapatan per kapita 10,5 juta rupiah per tahun; (2) proses transisi perkotaan yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 0,515 %/ tahun; (3) sistem perkotaan cenderung seimbang. Perkembangan awal Muntilan dipengaruhi oleh faktor kedekatan jarak dengan kota besar terdekatnya (10 km); faktor perkembangan jaringan transportasi l yang menentukan perkembangan kota kecil pada tahap selanjutnya. Perkembangan Kota Muntilan pada saat ini dicirikan oleh beberapa hal, yakni kecenderungan pertumbuhan penduduk rendah (< 1%/tahun), struktur perekonomian ditandai dengan dominasi sektor tersier dengan kontribusi rata-rata 50 persen, dan kawasan terbangun meningkat dengan pertambahan luas 1-2% per tahun. Fungsi Kota Muntilan cenderung menguat sebagai pusat pelayanan yang ditandai besaran nilai quosien >1 pada 3-5 sektor,

*Kata kunci: kota kecil, sistem perkotaan wilayah, faktor perkembangan kota*

## **DEVELOPMENT OF SMALL CITY MUNTILAN, MAGELANG REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE**

### **Abstract**

*Gaps still become common condition in small-scale city development studies that so far has less attention. Therefore, this research is aimed to analyze the history of the development of small cities and regional economies; contribution of location factors and their relationship with the development. The study was conducted in the small town of Muntilan, Magelang Regency, Central Java Province using a secondary data analysis research method. The unit of analysis is a census researched village. Data analysis used were quantitative and qualitative techniques.*

*The results of this study reveal the development of City of Muntilan characterized by: (1) the economic condition of the region which is growing at a rate of 6.42% / year, and income per capita of 10.5 million rupiah per year; (2) the urban transition process marked by urban population growth of 0.515% / year; (3) urban systems tend to be balanced. The initial development of Muntilan is influenced by the proximity factor to the closest major city (10 km); the development factor of the transportation network l that determines the development of the small town in the next stage. The development of the City of Muntilan at this time is reflected by several things, namely the trend of low population growth (<1% / year), the economic structure is characterized by the dominance of the tertiary sector with an average contribution of 50 percent, and the built area increases with an increase in area of 1-2% per year. The function of the Muntilan City tends to strengthen as a service center, which is marked by the magnitude of the quosien value > 1 in 3-5 sectors.*

*Keywords: small city, regional system, city development factor*

## I. PENDAHULUAN

Kota kecil merupakan tempat hidup bagi penduduk perkotaan. Dalam kenyataannya separuh dari seluruh jumlah penduduk perkotaan di seluruh dunia bertempat tinggal di kota-kota kecil (Tacoli, ed. 2006). Besarnya jumlah penduduk di kota-kota kecil biasanya kurang dari 500.000 jiwa, secara keseluruhan proporsi jumlahnya sekitar 25 persen dari seluruh jumlah penduduk dunia. Dari jumlah tersebut sekitar 50 persen berada di kota-kota kecil di Asia Tenggara (UNDESA, 2014). Hal ini dapat dinyatakan bahwa penduduk perkotaan di Asia Tenggara berada di kota-kota kecil. Kasus jumlah penduduk kota-kota kecil di Indonesia dengan ukuran kurang dari 500.000 jiwa, menurut UNDESA (2014) sudah sejak tahun 2000 sebanyak 68 persen dari jumlah penduduk perkotaan secara keseluruhan. Proporsi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan yang cukup pesat, mengingat jumlah penduduk yang berdiam di kota-kota kecil ini baru sekitar 57 persen pada tahun 1980.

Beberapa hasil sensus penduduk di Indonesia menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada kota-kota kecil lebih tinggi dari pada di kota-kota besar. Firman, dkk. (2007) menunjukkan laju pertumbuhan penduduk perkotaan di banyak kabupaten di Pulau Jawa lebih tinggi dari kota-kota, yang selama ini digunakan sebagai rujukan kajian urbanisasi di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dalam kaitannya dengan bahasan ini Mardiyansjah (2007), menunjukkan di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 1980-1990, bahkan menunjukkan tingkat urbanisasi yang sangat pesat, seperti misalnya Sukoharjo (27,64%), Klaten (10,22%), Jepara (16,12%) dan Tegal (16,0%). Kenyataan ini menunjukkan bahwa selain fenomena urbanisasi yang mengarah kepada terbentuknya *extended-mega urban regions* seperti dikemukakan Ginsburg, et al. (1991), proses urbanisasi juga terjadi pada wilayah yang berciri perdesaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menggambarkan bahwa kota-kota kecil memiliki dinamika dan peran yang penting dalam proses perubahan di suatu wilayah. Peran ini akan semakin meningkat pada masa yang akan datang, karena pergeseran mengarah kepada kekotaan akan terus berlangsung dan diprediksikan pada tahun 2050 kurang lebih 70 persen populasi Indonesia akan berada di perkotaan (UNDESA, 2014). Peran kota kecil seperti dikemukakan Tacoli, ed. (2006) sebagai jembatan penghubung terciptanya keterkaitan desa-kota yang bersifat timbal balik dan bersifat berkelanjutan wilayah akan semakin relevan pada masa-masa yang akan datang. Di samping itu, gagasan-gagasan tentang pembangunan wilayah dan kota berkelanjutan, dan signifikansi kota kecil dalam proses ini, sudah mewarnai wacana akademik sudah seharusnya untuk diperhitungkan dan dikaji secara mendalam.

Fokus penelitian pada kota kecil sudah lama dilakukan Hinderink dan Titus (2002) di beberapa negara berkembang. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kota-kota kecil di beberapa negara secara umum berkembang dengan karakteristik kota yang tidak mandiri, yakni berkembang secara *modest* dan memiliki fungsi pelayanan yang lemah. Prabatmodjo dan Firman (2006) dalam penelitian kasus Kota Soreang Jawa Barat, menunjukkan bahwa kota kecil sekadar berfungsi sebagai kota tempat istirahat (*dormitory town*) ketimbang sebagai pusat perkembangan baru. Firman (2006) lebih lanjut menyatakan, bahwa kota-kota kecil di Pulau Jawa mengalami perkembangan yang *stagnant*. Fenomena yang samajuga terjadi pada kota-kota kecil di koridor

Yogyakarta-Semarang, baik kota kecil Muntilan maupun Ambarawa. Hal ini dapat dicermati dari kegiatan sehari-hari, yang berlangsung pada kota-kota tersebut. Kedudukan kota-kota kecil di koridor Yogyakarta-Semarang pada jalan arteri tidak memberikan kontribusi bagi perkembangan kota-kota tersebut.

Kesenjangan yang masih sering terjadi dalam pengembangan pengetahuan studi kota kecil, baik dalam bidang geografi maupun perencanaan, selama ini kurang memperoleh perhatian (Ofori-Amoah, 2007; Bell and Jayne, 2009), termasuk juga dalam konteks Indonesia (Fahmi, et al., 2014). Demikian pula dalam sistem penataan ruang, pada umumnya berlaku seragam, telah terbukti kurang efektif sebagai pengarah perkembangan kota-kota di Indonesia, terutama dari aspek tata ruang (Hudalah and Woltjer, 2007). Oleh karena itu pengenalan terhadap aspek perkembangan kota kecil ini penting, karena dalam sistem penataan ruang di Indonesia tidak ada perbedaan antara kota kecil dan kota besar. Permasalahan seperti ini mendorong pentingnya penelitian di salah satu kota kecil, yakni di Muntilan. Tujuan penelitian untuk mengkaji: (1) sejarah perkembangan awal perkotaan mencakup faktor lokasi dan keterkaitan, (2) perkembangan saat ini terutama perkembangan internal dan fungsi kota.

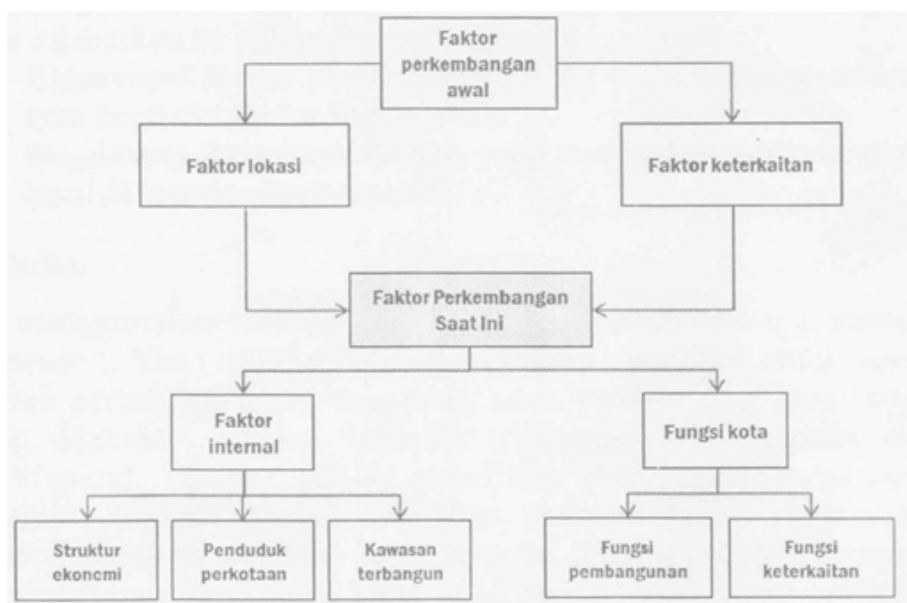
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kajian ini mengacu kepada teori dinamika perkembangan kota dan teori fungsi kota (Rondinelli, 1983-a; 1983-b). Dalam dinamika perkembangan kota kecil terdorong oleh 14 faktor. Seluruh faktor tersebut saling terkait dan terjadi secara sekuensial dan berulang secara siklis, mendorong melalui sebuah proses. Dalam konteks perkembangan kota di Indonesia keempat belas faktor ini tidak dengan mudah dapat ditemukan, apa lagi jika hal tersebut dikaitkan dengan ketersediaan data. Artinya, bahwa penyesuaian antara teori dengan data tersedia perlu dilakukan, sehingga dapat lebih *relevant* dengan kondisi yang ada. Penyesuaian dapat dilakukan dengan pengelompokan beberapa faktor, sehingga membentuk faktor dinamika perkembangan kota yang sederhana, seperti ditunjukkan Rondinelli (1983-a) sebagai berikut.

- (1) Perkembangan kota dimulai dengan keberadaan faktor perkembangan awal, yang bersifat mampu memperkuat dan mengkonsolidasikan perkembangan. Faktor tersebut mencakup dua komponen keterkaitan dan kedekatan.
- (2) Keberadaan faktor awal kota mengalami perkembangan, setiap perkembangan yang terjadi dalam waktu tertentu selalu berakhir dengan perubahan ukuran kota. Ukuran kota ini adalah gambaran wujud pada saat ini sehingga dapat disebut sebagai faktor perkembangan saat ini.
- (3) Faktor perkembangan saat ini terkait dengan dua hal. Pertama penambahan ukuran ruang kota, dan penambahan isi kota (manusia dan kegiatannya). Faktor ini bersifat internal kota, seperti penduduk, perekonomian dan kawasan terbangun. Kedua, adalah berubahnya pengaruh keberadaan kota terhadap wilayah sekitarnya. Hal ini mendasari teori fungsi kota.

Rondinelli (1983-b) menyatakan bahwa kota kecil secara umum memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama berhubungan dengan pembangunan dimana kota kecil berkembang sebagai pusat pelayanan jasa, ekonomi dan perdagangan, serta pusat pengolahan komoditas pertanian. Fungsi kedua berkaitan dengan sebuah fungsi yang memposisikan kota kecil sebagai pusat komunikasi,

transportasi dan transformasi sosial antara wilayah perdesaan dengan kota yang memiliki hirarki lebih tinggi. Kedua fungsi tersebut dapat dijabarkan ke dalam 8 fungsi, pusat pelayanan sosial dan publik, pusat pelayanan komersial dan pribadi, pusat perdagangan dan pemasaran wilayah, pusat pasokan dan pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat transportasi dan komunikasi wilayah, pusat tujuan migrasi dan sumber remitan penghasilan dan pusat transformasi sosial. Kajian empirik yang dilakukan Rondinelli di berbagai negara memberikan penjelasan, bahwa kota-kota kecil dapat berkembang dengan satu atau beberapa fungsi sekaligus.

Kota-kota kecil yang memiliki fungsi beragam cenderung berkembang yang lebih cepat, dari pada kota-kota yang hanya memiliki fungsi tunggal. Kota yang memiliki fungsi tunggal sering disebut sebagai minimal urban centre (Rondinelli, 1983-c), karena hanya menyediakan fasilitas yang bersifat pelayanan dasar. Keragaman fungsi tersebut dalasm beberapa kasus tidak berhubungan dengan ukuran kota, karena dalam kasus tertentu terdapat kota kecil dengan ukuran populasi kecil, tetapi memiliki fungsi yang beragam, sehingga posisinya sangat penting dalam sistem perkotaan wilayah. Keterkaitan antarkota ini penting karena sejarah perkembangan kota-kota dunia membuktikan, bahwa semakin banyak keterkaitan antara satu kota dengan kota lain menjadi indikasi semakin berkembangnya kota tersebut (Gambar. 1.).



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Kajian perkembangan kota kecil, dilaksanakan menggunakan metode penelitian studi kasus, dengan alasan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang mengandung kata bagaimana dan mengapa, yang dilaksanakan untuk untuk menelusuri kondisi kekinian dari pada segi kesejarahan (Yin, 2009). Sesuai dengan kerangka dasar penelitian yang diajukan dan dilihat dari ciri khas atau karakteristik populasi, maka penelitian ini termasuk studi kasus, msngingat tujuan penelitian tidak untuk menemukan hasil yang berupa generalisasi, karena pengetahuan yang dihasilkan hanya berkaitan dengan kasusnya (Yunus, 2010). Mengacu kepada pendapat Thomas (2011) penelitian ini dilakukan secara kasus untuk menganalisis kejadian periodik, melalui kajian holistik menggunakan satu metode atau lebih dari satu.

Penelitian dilakukan di kota Muntilan, Kabupaten Magelang, berdasar pertimbangan:

- (a) Memenuhi kriteria Bell and Jayne (2006) tentang jumlah penduduk kota kecil antara 25.000-75.000 jiwa), hingga tahun 2017 dihuni sebanyak 79.136 jiwa penduduk (BPS. Kab. Magelang, 2018). Kriteria ini sesuai juga dengan pengertian kawasan perkotaan kecil, sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 34/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- (b) Lokasi kota berdekatan dengan aglomerasi kota besar, yang cenderung membentuk *extended metropolitan region* (EMR). Kota ini menjadi bagian zona ruang desa-kota, yang menurut Ginsburg et al. Eds (1991) merupakan salah satu penciri unik transisi keruangan kota-kota di Asia Tenggara.
- (c) Kota ini bukan sebagai pusat utama pemerintahan. Sifat alami perkembangan kota juga sejalan dengan konsep 'kota biasa' seperti usulan Robinson (2006). Kriteria ini penting untuk mendalami perkembangan kota yang lebih bersifat alamiah, yang berbeda dengan kawasan perkotaan yang lebih berfungsi sebagai ibukota pemerintah, yang secara umum perkembangannya akibat alokasi anggaran lebih besar dari pada kota-kota lain.
- (d) Kota Muntilan dilewati jaringan jalan arteri yang berpengaruh terhadap pola transformasi keruangan desa kota. Seperti dikemukakan Giyarsih (2006) kedekatan dengan jalan mempengaruhi tingkat transformasi keruangan.

Daerah administrasi sebanyak 14 desa sebagai unit analisis penelitian. Pengumpulan data mengikuti syarat penggunaan studi kasus dilakukan secara sensus, sehingga unit analisis semuanya dikaji, dengan tahapan kegiatan (1) pengumpulan data primer dengan cara observasi lapangan, dan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen untuk setiap desa; (2) analisis data menggunakan analisis kuantitatif tabulasi frekuensi dan silang, untuk dasar analisis deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dilaksanakan secara interpretasi korelatif dan interpretasi komparatif.

## II. SEJARAH PERKEMBANGAN AWAL KOTA MUNTILAN

Perkembangan kota dimulai dengan keberadaan perkembangan awal, faktor yang bersifat mampu memperkuat dan mengkonsolidasikan perkembangan. Dengan demikian Faktor tersebut mencakup dua komponen keterkaitan dan kedekatan, atau dapat disebut faktor lokasi. Perubahan atau perkembangan daerah sangat bergantung pada keberadaan keterkaitan dan kedekatan. Muntilan sebagai daerah kajian perkembangan, ditelusuri dari aspek awal keberadaannya, beserta perubahan-perubahan yang terjadi sejak waktu lampau, berdasarkan pada tinjauan sejarah hingga masa kemerdekaan

### A. Keberadaan dan Perkembangan Daerah Permukiman

Daerah Kecamatan Muntilan merupakan salah satu dari 21 daerah kecamatan di Daerah Kabupaten Magelang. Daerah ini telah lama menjadi pusat kegiatan di sekitar lereng barat



Gunungapi Merapi, dan berada di jalur strategis, yakni jalur propinsi yang menghubungkan Kota Semarang, Magelang, dan Kota Yogyakarta. Sebagai kota kecil Daerah Kecamatan Muntilan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Magelang memiliki sejarah yang panjang. Meskipun tidak diketahui sejak kapan daerah ini dihuni sebagai permukiman berdasar pada kronologisnya, namun ‘Prasasti Canggal’ berangka tahun 732 dapat menjadi bukti tertua untuk mendiduga bahwa di daerah ini telah ditemukan adanya bukti kehidupan manusia. Di samping prasasti tersebut, keberadaan sejumlah candi besar di sekitar Kota Muntilan seperti Candi Ngawen, Borobudur, Mendut, Pawon dan beberapa candi di sebelah utara (Dukun, Sawangan) membuktikan bahwa daerah ini telah dihuni sejak masa pemerintahan Mataram Hindu akhir abad VIII.

Keberadaan candi-candi tersebut bukan hanya membuktikan adanya permukiman penduduk, tetapi juga mengindikasikan bahwa daerah itu berkualitas subur. Selain itu menunjukkan bahwa Muntilan termasuk wilayah, yang secara spiritual dan politis dianggap penting dalam struktur kerajaan dengan nilai tinggi bagi penguasa Hindu masa itu. Fakta seperti itu terjadi juga ketika Muntilan berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram Islam, Muntilan diduga sebagai bagian dari lingkup teritorial dari sistem kekuasaan agraris raja-raja Jawa, dengan status sebagai bagian dari ‘Negara agung’. Hal ini mengingat kondisi sumberdaya alam dan geografisnya, memiliki lahan subur, dialiri beberapa aliran sungai, dan kandungan abu vulkanis dari gununggrapi, yang berpotensi pada kesuburan tanah yang tinggi, yang berakibat pada produktitas tinggi.

Ditinjau dari aspek sistem sosial politik, pemerintahan di Daerah Kecamatan Muntilan telah terjadi secara silih berganti. Sejak masa Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta dalam Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Daerah Muntilan yang tercakup kedalam Daerah Kedu menjadi bagian daerah *Negara Agung* kedua kerajaan itu dalam pembagian tidak teratur. Diduga Muntilan termasuk wilayah ‘Negara Agung’ Kesultanan Yogyakarta karena kedekatan daerahnya dengan pusat kekuasaan Yogyakarta. Bukti dari keterikatan dengan Kesultanan Yogyakarta adalah adanya seorang bangsawan kraton Yogyakarta yang dikuburkan di desa *Gunung Pring* dan dijadikan sebagai tokoh penting oleh masyarakat sekitarnya.

Hal ini berlangsung sampai tahun 1812, ketika berdasarkan kontrak politik antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Inggris pada tanggal 1 Agustus 1812, wilayah Kedu termasuk Muntilan harus diserahkan kepada pemerintah Inggris. Setahun kemudian, pemerintah Inggris menjadikan Muntilan sebagai bagian dari Kabupaten Magelang di bawah pimpinan bupati pertama Raden Tumenggung Danuningrat I. Muntilan selanjutnya dijadikan daerah administratif setingkat distrik di bawah seorang wedana, pada awalnya yang berkedudukan di Desa ‘Probolinggo’ bagian timur Muntilan. Pada tahun 1822 Probolinggo dijadikan sebagai kabupaten sendiri, dipimpin bupati berkedudukan di Muntilan, yang berperan penting ketika terjadi perang Diponegoro dalam pembangunan sebuah benteng pada tahun 1825, di kota ini (daerah Beteng) untuk membatasi gerakan gerilya Diponegoro dan pasukannya.

## **B. Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah**

Pada tahun 1832 perang Diponegoro berakhir, perubahan administrasi terjadi dengan penghapusan kabupaten Probolinggo (Muntilan) diturunkan menjadi kawedanan atau distrik. Muntilan tetap menjadi ibukota distrik, dan selama *Kultuurstelsel* menjadi penyedia lahan bagi

penanaman tebu untuk kepentingan pabrik gula swasta yang dibuka di wilayah Yogyakarta. Pada masa itu arti penting Muntilan sebagai ‘kota’ mulai tampak dengan peningkatan pemukimannya dan permukimannya, yang dihuni oleh Orang Jawa, Cina dan etnis Arab. Perkampungan Cina di Muntilan telah berdiri sejak awal abad XIX (1871) yang dipimpin oleh seorang kepala kampung. Artinya sudah sejak lama Muntilan secara sosial ekonomis sebagai wilayah permukiman yang dinamis. Dinamikanya berawal dari adanya peningkatan infrastruktur penting, pendukung kehidupan sosial ekonomi daerah.

Bukti lain dari dinamisasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muntilan adalah difungsikannya kota ini sebagai penghubung jalur kereta api. Jalur transport ini dibangun oleh perusahaan kereta api *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* yang membuka jaringan kereta api dari Yogyakarta ke Magelang melalui Muntilan, pada akhir tahun 1895. Jaringan rel ini mulai dipasang di Muntilan pada tahun 1897 dan pada tahun 1898 halte Muntilan siap menerima persinggahan kereta api yang melaju dari Yogyakarta ke Magelang dan sebaliknya. Sarana komunikasi lain yang terdapat di Muntilan saat itu adalah pelayanan pos. Pada tahun 1906 kantor pos pembantu dibuka untuk melayani kebutuhan korespondensi warga Muntilan. Melalui kantor pos induk di Magelang, kantor pos pembantu di Muntilan dapat memenuhi kebutuhan warga pada masa itu dengan pengiriman surat dan paket barang.

Kehidupan sosial ekonomi wilayah yang penting di Muntilan makin terbukti dari adanya pertumbuhan dalam hal kehidupan sosial beragama dari komunitas yang tinggal di kota ini. Untuk melayani kebutuhan administrasi dan sosial, terutama untuk pemerintah. Belanda mendirikan sebuah sekolah dasar sederhana pertama kali di Muntilan pada tahun 1851. Pada awal tahun 1870-an sebuah rumah ibadah bagi komunitas Tionghoa, kelenteng, didirikan di Muntilan. Bangunan yang pada awalnya terbuat dari bambu menjadi sarana ibadah bagi masyarakat Tionghoa, yang semula terletak di pemukiman masyarakat utama. Karena tuntutan situasi, bangunan ini kemudian dibongkar dan dipindahkan ke lokasi yang ada sekarang, di depan rumah pegadaian Muntilan pada tahun 1905. Perpindahan kelenteng saat itu juga diikuti oleh pembukaan sekolah oleh yayasan Cina pada tahun 1906.

Selain infrastruktur tersebut di atas, Muntilan juga mengalami perkembangan dengan hadirnya misi Katolik yang dirintis oleh Pastur F. van Lith pada tahun 1894. Sejak kedatangannya sebagai misionaris, pastur van Lith terus berkarya dengan fokus mengentaskan kualitas hidup orang Jawa. Untuk itu lewat interaksinya dengan masyarakat pribumi, pastur van Lith mampu membawa unsur kehidupan modern dalam kehidupan sosial mereka termasuk sektor kesehatan. Pembangunan poliklinik sederhana, yang menjadi cikal bakal rumah sakit umum Kabupaten Magelang di Muntilan pada tahun 1902.

Kemajuan yang pesat dari perkembangan kehidupan ‘kota’ Muntilan saat itu mendorong pemerintah kolonial Belanda meningkatkan status administrasi. ‘Kota’ Muntilan berfungsi sebagai pusat pemerintahan distrik, dalam reorganisasi pemerintahan yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 1901, status Muntilan sebagai ibukota distrik atau kawedanan Muntilan. Sejak tanggal tersebut Muntilan memiliki dua pimpinan pemerintahan: *kontroleur* untuk urusan pemerintahan Eropa, dan *wedana* untuk membawahi orang pribumi. Kehidupan masyarakat Muntilan pada masa kolonial berlangsung dinamis. Kemajuan semakin tampak ketika sarana bidang penerangan ditingkatkan oleh perusahaan listrik NV. Aniem, melayani ‘kota’ Muntilan dan sekitarnya pada

tahun 1925. Bersamaan dengan itu, satu tahun kemudian jaringan telepon mulai memasuki kota Muntilan sebagai prasarana publik.

Di bidang pendidikan Muntilan dikenal sebagai pusat pendidikan modern untuk Kabupaten Magelang dan Karesidenan Kedu. Pendidikan modern dirintis bersamaan dengan misi agama Katolik, yang mulai membuka sekolah guru sederhana pada tahun 1905. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi sehingga pada tahun 1917 sekolah ini ditingkatkan menjadi sekolah yang menghasilkan tenaga guru untuk mengajar di sekolah dasar. Bagi kebutuhan pendidikan sekolah dasar, misi Katolik melayani pembukaan sejumlah sekolah mulai dari sekolah rakyat hingga HIS sebagai pendidikan Belanda bagi anak pribumi yang dapat meneruskan ke jenjang menengah yakni MULO. Ketika tuntutan bagi pendidikan khusus untuk anak-anak Tionghoa dirasakan mendesak, misi Katolik membuka *Hollandsch Chinese School* (HCS) yang setara dengan HIS pada tahun 1939. Selain itu juga beberapa sekolah khusus dibuka oleh misi seperti *Schakelschool* (sekolah penghubung bagi siswa *Vervolgschool* untuk masuk HIS), sekolah untuk tenaga tukang dan sekolah guru untuk mengajar Sekolah Rakyat. Alumni sekolah ini tersebar sebagai tenaga guru di seluruh Indonesia.

Muntilan pada era pendudukan Jepang sejak bulan Maret 1942, berada di bawah pimpinan seorang perwira militer bernama Letnan Suchiara. Lokasi yang sebelumnya merupakan kompleks pendidikan oleh misi Katolik saat itu, diubah menjadi kamp internir untuk menahan semua orang Belanda di wilayah Magelang dan sekitarnya. Sampai bulan Oktober 1943 semua orang Belanda ditahan di tempat ini, dan baru setelah bulan itu kaum pria dipindahkan ke kamp internir di Ambarawa. Selama pendudukan Jepang, Muntilan tidak ada kemajuan, tetapi justru kerusakan pada infrastruktur kota yang banyak terjadi.

Informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai di Muntilan beberapa hari setelah tanggal 17 Agustus 1945, yang disiarkan melalui radio dan dibawa oleh para tokoh perjuangan dari Yogyakarta. Peristiwa ini menandai suasana revolusi yang berlangsung sampai tahun 1949 dengan diwarnai oleh sejumlah insiden berdarah yang melanda masyarakat Muntilan pada tanggal 21 November 1945. Beberapa peristiwa penting dalam nuansa revolusi, termasuk jatuhnya korban dan pembakaran bangunan, melanda kota ini seperti aksi bumi hangus menjelang masuknya tentara Belanda pada bulan Desember 1948 ke Kota Muntilan. Kota Muntilan kembali pada suasana normal dan persatuan kembali tercipta pada bulan Oktober 1949 setelah situasi politik nasional kembali kondusif kesatuan gerilya RI memasuki kota ini dan tinggal sementara di kompleks Pecinan, tanggal 18 Oktober 1949. Beberapa orang perwira yang menjadi komandan kesatuan gerilya di selatan Muntilan memimpin pasukannya untuk menegakkan pemerintahan RI dan menjaga ketertiban di sana.

### **III. PERKEMBANGAN KOTA MUNTILAN SAAT INI**

Faktor perkembangan saat ini mencakup aspek internal dan fungsi kota, tidak lepas dari faktor sejarah sebelumnya. Secara alamiah setiap kota selalu memiliki fungsi, pertama sebagai pusat pelayanan sosial dan publik karena fungsi ini adalah prasyarat minimum eksistensi kota. Fungsi sebagai pusat pelayanan dan fungsi lain yang sejenis disebut sebagai fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan kota mempunyai makna bahwa keberadaan fungsi ini menjadi komponen



penting dalam proses perkembangan kota sebagai pusat permukiman. Kota yang tidak memiliki fungsi pembangunan cenderung mengalami perkembangan yang lamban, dan pada saatnya akan ditinggalkan. Fungsi kedua berhubungan dengan keberadaan kota kecil dalam sistem perkotaan Wilayah. Keterkaitan antarkota ini penting karena sejarah perkembangan kota-kota dunia membuktikan bahwa semakin banyak keterkaitan antara satu kota dengan kota lain menjadi indikasi semakin berkembangnya kota tersebut.

#### **A. Distribusi Kawasan Perkotaan**

Sebagaimana kota pada umumnya Kota Muntilan mengalami perkembangan secara temporal. Perkembangan ini dimulai dengan adanya faktor yang beragam, tetapi pada umumnya berkaitan dengan kondisi yang mendukung tempat tersebut berkembang sebagai pusat permukiman. Kondisi yang mendukung ini karena murni potensi alamiah semata, dapat juga akibat pengaruh adanya pembangunan atau kedua-duanya. Faktor ini pertama terdiri atas faktor lokasi, yakni kedekatan, atau jarak terhadap pusat kegiatan, serta karakteristik aspek-aspek fisik kota kecil. Faktor kedua adalah faktor keterkaitan yakni faktor yang berhubungan dengan konektivitas atas keberhubungan antara kota kecil terhadap kota lain baik setara ataupun yang lebih besar. Faktor keterkaitan ini berhubungan dengan keberadaan prasarana transportasi.

Sejalan dengan proses perkembangan kota secara temporal perwujudannya dapat diamati. Faktor perkembangan saat ini dapat dibedakan menjadi dua, internal berkaitan dengan aktivitas yang berada di dalam kotanya sendiri. Proses interaksi menghasilkan kegiatan-kegiatan ekonomi baik bersifat produktif maupun konsumtif. Pola konsumsi dan pola produksi ini yang akhirnya menentukan perekonomian kota. Semakin besar jumlah populasi maka semakin besar dan beragam kegiatan ekonomi. Struktur perekonomian kota dapat mengalami perkembangan isi dan komposisi dalam struktur dan pertumbuhannya, sehingga melahirkan diversifikasi maupun spesialisasi sektor-sektor ekonomi. Kegiatan yang berada dalam kota semakin beragam, makin bertambah perluasannya, baik perluasan jangkauan dan areal wilayahnya, dari lahan kosong menjadi kawasan terbangun.

Faktor perkembangan saat ini mencakup juga aspek fungsi kota. Secara alamiah setiap kota selalu mempunyai fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial dan publik, karena fungsi ini adalah prasyarat minimum eksistensi kota. Fungsi sebagai pusat pelayanan ini dan fungsi lain yang sejenis disebut sebagai fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan kota mempunyai makna bahwa keberadaan fungsi ini menjadi komponen penting dalam proses perkembangan kota sebagai pusat permukiman. Kota yang tidak mempunyai fungsi pembangunan cenderung mengalami pelambatan perkembangan dan pada saatnya akan ditinggalkan. Fungsi kedua berhubungan dengan keberadaan kota kecil dalam sistem perkotaan.

Komposisi perkotaan di daerah cukup beragam. Berdasarkan definisi operasional perkotaan yang dikembangkan oleh BPS (2018), daerah perkotaan Muntilan yang populasinya lebih dari 10.000 jiwa (Tabel. 1) mencakup dua Desa Gunungpring dan Taman Agung, sedangkan dua Desa Sedayu dan Pucungrejo berpenduduk lebih dari 8.000 jiwa, dan Kelurahan Muntilan sendiri dan Desa Keji baru berpenduduk lebih dari 6.000 jiwa. Maknanya bahwa hingga tahun 2018 kawasan perkotaan yang berpenduduk 6.000 hingga 10.000 jiwa atau lebih baru lima desa dan satu kelurahan. Jumlah penduduk Kota Muntilan sebagai kawasan kota kecil mengalami peningkatan

yang signifikan sejak tahun 2002 hingga tahun 2018, sebesar 0,515 persen pertahun. Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan daerah ini ditandai dengan kemunculan pertumbuhan penduduk di setiap desa secara bervariasi. Hal ini juga mengindikasikan meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah perdesaan yang memicu perkembangan kawasan perkotaan kecil tersebut sebagai pusat pembangunan untuk daerah perdesaan. Kecenderungan ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa sedang terjadi urbanisasi yang lebih seimbang di daerah ini.

Tabel. 1. Distribusi Penduduk di Kecamatan Muntilan Tahun 2018

No.	Desa/ Kelurahan	2002		2018		Kepdatn Jw/km2	Pertam-bahan (%)	Pertumbuhan (%/th)
		Jiwa	RT	Jiwa	RT			
1	Tanjung	2.030	527	2.068	1 832	723	2	0,11
2	Sokorini	4.910	1.198	5.032	2 141	1.690	2	0,15
3	Sriwedari	3.137	824	3.541	1 659	1.194	11	0,71
4	Congkrang	2.794	724	3.169	2 392	1.041	12	0,74
5	Adikarto	3.117	731	3.348	2 295	1.091	7	0,43
6	Menayu	2.526	563	2.915	2 312	933	13	0,83
7	Keji	5.598	1.509	6.390	2 361	2.120	12	0,77
8	Ngawen	3.604	891	3.831	1 889	1.310	6	0,37
9	Gunungpring	9.105	2.190	10.897	4 951	3.580	16	1,03
10	Pucungrejo	8.526	2.254	8.601	5 907	2.903	1	0,05
11	Taman Agung	8.895	2.186	10.680	3 481	3.463	17	1,04
12	Gondosuli	3.841	917	4.066	1 259	1.328	6	0,35
13	Sedayu	8.021	2.037	8.537	3 832	2.784	6	0,38
14	Muntilan	5.837	1.468	6.061	2 977	2.059	4	0,23
	Jumlah	71.941	18.019	79.136	2 766	26.219		0,515

Sumber: BPS. Kab. Magelang, 2018

Salah satu pola umum urbanisasi di negara-negara berkembang adalah kecenderungan tingkat keutamaan kota (*urban primacy*) yang tinggi (Armstrong & McGee, 1985; Kasarda & Crenshaw, 1991; Potter & Lloyd-Evans, 2014). Distribusi perkotaan daerah perdesaan di Kecamatan Muntilan mempunyai pola yang berbeda. Distribusi kawasan perkotaan di daerah ini cenderung normal, bila diukur dengan distribusi absolut yakni sepanjang jalan Yogyakarta-Kota Magelang. Kelurahan Muntilan dan pusat-pusat desa utama lainnya memang telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, karena peran mereka secara historis sebagai salah satu pusat kota awal di Kecamatan Muntilan. Pertumbuhan pusat kota terbesar di wilayah ini belum menciptakan dikotomi ‘inti-pinggiran’. Sebaliknya, yang terjadi adalah kecenderungan penyebarluasan pembangunan ke daerah yang relatif semakin jauh dari jalan utama. Hal ini sejalan dengan pendapat Titus (1991) dan Wouden (1997) yang mengatakan bahwa kota-kota kecil di Jawa Tengah memiliki dinamika mereka sendiri yang menempatkan mereka pada posisi penting untuk wilayah pedalaman masing-masing

## B. Perkembangan Perekonomian Wilayah

Data pertumbuhan dan tingkat pendapatan dapat digunakan untuk menyusun klasifikasi perkembangan ekonomi suatu wilayah (Klaassen, 1965). Selama kurun waktu 2002-2018, sebagian

subdaerah di perdesaan merupakan tertinggal (*distressed areas*), yakni dari indikator pertumbuhan dan pendapatan per kapita daerah-daerah ini berada di bawah rata-rata daerah secara keseluruhan. Daerah maju dan berkembang cenderung terkonsentrasi di kalurahan utama yang menjadi pusat kegiatan daerah Kecamatan Muntilan. Hal tersebut memberikan penjelasan, bahwa perkembangan pusat utama daerah kecamatan telah mempengaruhi perkembangan daerah sekitarnya.

Konsentrasi daya tarik aktivitas ekonomi pada pusat pertumbuhan telah menciptakan aglomerasi ekonomi dan mempengaruhi perkembangan daerah di sekitarnya. Pada satu sisi, kondisi ini menguntungkan karena mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah secara umum. Pada sisi yang lain kondisi ini dapat menimbulkan pengaruh semakin membesarnya ketimpangan antardaerah. Secara teoritis ketimpangan ini dapat berkurang sesuai dengan perkembangan daerah, apalagi jika ada instrumen kebijakan yang tepat untuk mengelola perkembangan yang terjadi. Kondisi sebaliknya dapat terjadi apabila mekanisme pasar berjalan lebih dominan.

Ditinjau dari aspek struktur perekonomian wilayah kota Muntilan menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan profil ekonomi wilayah kabupaten. Di kota Muntilan dominasi sektor tersier sangat kuat karena setidaknya 60% dari perekonomian wilayah disumbang dari sektor ini. Tingginya kontribusi sektor tersier ini mengindikasikan bahwa fungsi-fungsi perkotaan berjalan sebagaimana mestinya di Kota Muntilan. Ditinjau dari konteks wilayahnya juga menjadi tanda bahwa Muntilan sedang mengalami transisi ekonomi yang mengarah pada peningkatan sektor tersier sebagai penggerak utama perekonomian wilayah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir tidak terjadi perubahan struktur perekonomian yang signifikan di kota ini, kecuali pada kondisi di mana penurunan kontribusi sektor tersier sejalan dengan meningkatnya kontribusi sektor primer. Ada kemungkinan nilai tambah sektor primer di Muntilan mengalami perubahan selama periode tersebut.

### **C. Perkembangan Penduduk Perkotaan**

Selama periode 1993-2018 pertumbuhan penduduk Kota Muntilan sedikit lebih tinggi daripada di Kabupaten Magelang secara keseluruhan. Sebaran pertumbuhan penduduk perkotaan ini secara umum terkonsentrasi pada daerah di sekitar kota pusat pertumbuhan dan sepanjang jalan koridor Yogyakarta kota Magelang. Beberapa kawasan perkotaan di sekitar Kelurahan Muntilan, bahkan mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan lain. Pertumbuhan kawasan perkotaan di sekitar pusat pertumbuhan tersebut bahkan melebihi pertumbuhan penduduk di kota induknya. Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di beberapa kawasan perkotaan di sepanjang koridor Yogyakarta-Kota Magelang. Proses integrasi kawasan perkotaan sepanjang koridor Yogyakarta-Kota Magelang ini sedikit berbeda dengan tipologi perkembangan ekonomi daerah. Perekonomian daerah di sepanjang koridor Yogyakarta-Kota Magelang tergolong ke dalam kelompok mundur. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita secara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata daerah Kabupaten Magelang.

Dalam kurun waktu 20 puluh tahun sejak 1990 hingga 2010, di kota Muntilan mengalami perkembangan perkotaan yang sedikit berbeda. Pada 1990, di kota Muntilan, mempunyai komposisi penduduk perkotaan yang sudah lebih besar dari 50%. Dua puluh tahun kemudian, pada

2010 Muntilan mempunyai hampir 70% penduduk kota. Fakta ini mampu memberikan gambaran bahwa terjadi fenomena transisi perdesaan-perkotaan yang sangat besar dalam kurun waktu 1990-2000, sementara pada dasawarsa berikutnya perkembangannya yang terjadi cenderung stabil.

#### **D. Faktor Keterkaitan**

Faktor keterkaitan sangat penting bagi sistem kota kecil Muntilan. Milone (1966) dalam penelitiannya tentang perkembangan kota-kota di Indonesia menyebutkan, bahwa – Muntilan sejak 1920 belum berkembang sebagai kota, mengingat tercatat dalam statistik. Ini mengindikasikan bahwa kota Muntilan masih merupakan kawasan perdesaan. Faktor awal itu menjadi tonggak bagi perkembangan kota kecil ini pada periode selanjutnya. Semakin berkembang pada masa pasca kemerdekaan sampai dengan periode 1980an. Muntilan baru dihitung sebagai kota pada 1980, dan memang sampai dengan 1980 masih merupakan kawasan perdesaan. Data perkembangan awal ini memberikan petunjuk bahwa faktor awal yang terkait dengan keterkaitan dengan wilayah atau kota lain telah memberikan kontribusi bagi perkembangan kota. Dalam hal ini keberadaan jaringan transportasi telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan kota di periode awal perkembangannya.

Penciri utama fungsi keterkaitan pada suatu kota adalah keberadaan hub transportasi. Di kota kecil Muntilan telah terdapat terminal angkutan penumpang, yang digunakan untuk jalur antarkota maupun antara kota dengan wilayah belakangnya. Dari terminal kota tersebut cenderung mengalami peningkatan fungsi, karena tingginya penggunaan terminal ini sebagai tempat awal dan tujuan perjalanan. Terminal Muntilan menjadi salah satu titik berangkat bus-bus antarkota yang berjarak panjang. Sementara itu terminal Muntilan masih menjadi titik awal dan akhir perjalanan ke wilayah-wilayah perdesaan belakangnya, meskipun kecenderungan penurunan juga terjadi di terminal ini

Kawasan terbangun di Muntilan juga mengalami perkembangan meskipun tidak sebesar perkembangan yang terjadi pada tingkat kabupaten Magelang. Data statistik (BPS, 2016) memberikan konfirmasi bahwa perkembangan kawasan terbangun di kota tersebut tidak signifikan. Muntilan hanya mengalami penambahan kawasan terbangun pada kisaran 1% hingga 4% selama 5 tahun tersebut. Dari fakta perkembangan Kawasan terbangun ini dapat dikatakan bahwa kota tersebut masih bercirikan perdesaan karena masih didominasi oleh lahan nonterbangun. Keuntungan lokasi yang dimiliki oleh kota kecil tersebut tidak menjadi daya tarik perubahan ekonomi sehingga ini berakibat pada rendahnya perkembangan kawasan terbangun.

#### **E. Fungsi Kota**

Kota Muntilan berkembang dan mempunyai fungsi pembangunan, antara lain sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan sosial, pusat perdagangan, dan pusat wisata. Keberadaan beberapa fungsi pembangunan di kota kecil ini menjadi indikasi awal bahwa kota ini mempunyai potensi untuk berkembang di masa yang akan datang, meskipun beberapa faktor perkembangan pada saat ini mengalami pelambatan. Perkembangan selanjutnya akan dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi faktor yang bersifat eksternal akan lebih banyak menentukan perkembangan kota ini pada masa yang akan datang.

Penciri utama fungsi keterkaitan pada suatu kota adalah keberadaan hubungan transportasi. Di kota Muntilan telah terdapat terminal angkutan penumpang, yang digunakan untuk jalur antarkota maupun antara kota dengan wilayah belakangnya. Terminal di kota Muntilan cenderung mengalami peningkatan fungsi, karena tingginya intensitas penggunaan terminal sebagai tempat awal dan tujuan perjalanan. Kondisi terminal semakin lebih baik karena menjadi salah satu titik berangkat bus-bus antarkota yang berjarak panjang. Sementara itu terminal ini masih menjadi titik awal dan akhir perjalanan ke wilayah-wilayah perdesaan belakangnya, meskipun kecenderungan penurunan juga terjadi di terminal ini.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dalam memahami perkembangan Muntilan sebagai kota kecil dalam konteks sistem perkotaan wilayah koridor Kota Yogyakarta-Kota Magelang, dapat dinyatakan bahwa sebagai permukiman memiliki sejarah perkembangan yang panjang. Keberadaan Muntilan telah diketahui sejak masa kerajaan Mataram kuna. Namun secara tegas Muntilan sebagai daerah Kecamatan terjadi sejak peralihan kekuasaan dari Kesultanan Yogyakarta kepada pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1812. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan daerah ini, sejak awalnya hingga tahun 2018 antara lain faktor lokasi, infrastruktur, perkembangan penduduk, perekonomian daerah, fungsi-fungsi daerah dan keterkaitan.

Faktor lokasi terutama kedekatan terhadap kota besar yang kedudukan lebih tinggi dalam struktur perkotaan wilayah menjadi faktor awal perkembangan kota kecil Muntilan. Faktor perkembangan jaringan transportasi, menentukan perkembangan awal kota kecil khususnya jaringan kereta api, yang selanjutnya perkembangan jaringan jalan raya. Faktor perkembangan penduduk meskipun pertumbuhannya rendah, namun tetap berpengaruh terhadap perkembangan kota kecil. Pengaruh faktor ini terkait dengan perkembangan kawasan terbangun di kota kecil meningkat dengan pertumbuhan yang rendah.

Struktur perekonomian kota kecil ditandai dengan dominasi sektor tersier. Hal ini mengindikasikan bahwa kota kecil cenderung berkembang sebagai pusat pelayanan. Pada fungsi pembangunan kota kecil berkembang dengan beberapa fungsi yang berbeda. Pada umumnya kota kecil berkembang dengan fungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi (perdagangan), pelayanan sosial pusat pemerintahan dan pelayanan umum. Perkembangan fungsi-fungsi pembangunan tersebut didorong oleh diversifikasi kegiatan perekonomian. Fungsi keterkaitan kota kecil berkembang karena adanya fasilitas transportasi yang berkembang telah lama.

##### **B. Saran**

Penelitian perkembangan kota kecil ini dapat memberikan implikasi kebijakan pengelolaan kota. Dua aspek mendasar yang berhubungan dengan perkembangan kota kecil belum terakomodasi secara baik dalam perencanaan. Hal ini terjadi ketidaksinkronan secara substantif antara perencanaan pada skala wilayah dengan perencanaan pada skala kota. Pengelolaan kota dilakukan dalam kendali pemerintahan yang jauh, karena pemerintah kecamatan hampir tidak



memiliki peran yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memperbaiki kondisi ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan kota kecil pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, W., & McGee, T. G.(1985). *Theatres of accumulation: studies in Latin American and Asian Urbanisation*. London: Methuen.
- Bell, D. and Jayne, M., (2009). Small Cities? Towards a research Agenda, *International Journal of Urban and Regional Research*, 33 (3) 684-699.
- BPS, Kab. Magelang, (2016). Kecamatan Muntilan Dalam Angka 2016, Mungkid: BPS. Kab. Magelang.
- BPS. Kab. Magelang, (2018). Kecamatan Muntilan Dalam Angka 2018, Mungkid: BPS. Kab. Magelang.
- Fahmi, F.Z., Hudalah, D., Rahayu, P., Woltjer, J. (2014). Extended Urbanization in Small and Medium-sized Cities: The Case of Cirebon, Indonesia. *Habitat International*, 42, 1-10
- Firman, T., Kombaitan, B., dan Pradono, P. (2007). The Dynamics Of Indonesia's Urbanization, 1980-2006. *Urban Policy and Research*, 25 (4), 433-454.
- Firman, T., (2016). Demographic Patterns of Indonesia's Urbanization, 2000-2010: Continuity and Change at The Macro Level, in C.Z. Guilmoto and G.W. Jones (eds.), *Contemporary demographic transformation in China, India, and Indonesia* (pp. 255-269). Springer International Publishing.
- Giyarsih, S. R. (2006). Pola transformasi Spasial di Koridor Segitiga Pertumbuhan Joglosemar, *Makalah pada Workshop Penelitian Berorientasi Paten Tahun 2006* di Jakarta.
- Ginsburg, N. S., Koppel, B., & McGee, T. G., (eds.).(1991). *The Extended Metropolis Settlement Transition In Asia*. University of Hawaii Press.
- Hinderink, J., and Titus, M. (2002). Small Town and Regional Development: Major Findings and Policy Implications from Comparative Research. *Urban Studies*. 39(3), 379-391.
- Hudalah, D. and Woltjer, J. (2007). Spatial Planning System in Transitional Indonesia, *International Planning Studies*, 12(3), 291-303.
- Kasarda, J. D., & Crenshaw, E. M. (1991). ThirdWorld Urbanization: Dimensions, Theories and Determinants. *Annual Review of Sociology*, 467-501.
- Klaassen, L.H. (1965). Area Economic and Social Redevelopment, Guidelines for Programmers, *Developing Job Opportunities*, OECD.
- Mardiyansjah, F., (2007). *Urbanisasi Wilayah Berkelanjutan dan Kebijakan Pembangunan Perkotaan di Inonesia: Studi Kasus dari Tiga Kabupaten yang Terurbanisasi Tercepat di Pulau Jawa*. Laporan Penelitian Hibah Penelitian Beasiswa Unggulan.

- Milone, P.D. (1966). *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts*. Vol. 10. Institute International Studies, University of California.
- Ofori-Amoah, B., (2007). *Beyond the Metropolis: Urban Geography as If Small Cities Mattered*. Lanham: Universty Press of America.
- Peraturan Pemerintah No. 34. Tahun (2009) tentang *Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan*
- Potter, R.B.& Lloyd-Evans, S. (2014). *The City in the Developing World*. Routledge
- Prabatmodjo, H. and Firman, T. (1996). Problem of Small Town Development in a Rapidly Growing Metropolitan Economy. The Case of Soreang West Java. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast*. 11(2), 314-333.
- Robinson, J. (2006). *Ordinary Cities: Between Modernity and Development*. London :Routledge.
- Rondinelli, D. 1(983-a). Dynamics of Growth of Secondary Cities in Developing Countries. *Geographical Review*, 73 (1), 42-57.
- \_\_\_\_\_. (1983-b). *Secondary Cities in Developing Countries*. London: Sage Publisher.
- \_\_\_\_\_. (1983-c). Towns and Small Cities Cities in Developing Countries. *Geographical Review*, 73 (4), 379-395.
- Tacoli, C. (ed.). (2006). *The Earth can Reader in Rural-Urban Linkages*. London: Earthscan Publication.
- Thomas, G. (2011). A Typology for4 the Case Study in Social Science Following Review of Definition Discourse and Structure. *Qualitative Inquiry*, 17 (6), 511-521.
- Titus, M.J. (1991). A Structural Model for Analysing Production Relations and Regional Functions of Small Towns in Central Java. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 82(4), 266-281.
- UNDESA, (2014). *World Urbanization Prospects 2014: Highlights*. United Nations Publications.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Wouden, A.A. (1997). *Three Small Towns in Central Java*. Netherlands Geographical Studies, 221.
- Yin, R. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. Fourth Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Yunus, H.S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

